

## **BAB IV**

### **ALASAN SWEDIA MEMUTUSKAN HUBUNGAN KERJASAMA MILITER DENGAN ARAB SAUDI PADA TAHUN 2015**

Setelah penjabaran tentang politik luar negeri dan kebijakan ekspor militer Swedia pada bab II, serta dinamika hubungan Swedia dan Arab Saudi pada bab III, maka pada bab IV ini penulis menjelaskan tentang alasan yang mendasari mengapa Swedia memutuskan hubungan kerjasama militer dengan Arab Saudi.

Dalam menjawab permasalahan ini penulis akan menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri Willian D. Coplin. Dalam teori pengambilan keputusan luar negeri ini terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi seorang pengambil kebijakan luar negeri yaitu; politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Dalam kasus pemutusan kerjasama militer Swedia-Arab Saudi ini penulis hanya akan berfokus ada dua faktor dalam menjawab permasalahan ini, yaitu faktor politik dalam negeri dan faktor konteks internasional karena faktor ekonomi dan militer menurut penulis bukanlah menjadi alasan kuat yang mendasari pemutusan hubungan kerjasama militer Swedia dengan Arab Saudi.

Maka dengan hanya menggunakan dua faktor yang ada dalam teori pengambilan keputusan William D. Coplin ini, yaitu faktor politik dalam negeri dan faktor konteks internasional, nantinya akan dapat menjelaskan alasan mengapa Swedia memutuskan untuk menghentikan kerjasama militernya dengan Arab Saudi.

## **A. Pelanggaran hak asasi manusia oleh Arab Saudi**

Kerajaan Arab Saudi adalah kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan monarki yang sekarang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintah mendasarkan legitimasinya pada penafsirannya tentang syariah (hukum Islam) dan undang-undang dasar 1992 yang menetapkan bahwa penguasa negara adalah keturunan laki-laki dari raja. Undang-undang dasar menetapkan sistem pemerintahan, hak warga negara, kekuasaan dan tugas pemerintah dan menetapkan bahwa Al-Qur'an dan Sunah berfungsi sebagai konstitusi negara (Saudi Arabia 2017 human rights report, 2017).

Hak asasi manusia yang ditegakkan di Arab Saudi bersumber dari hukum Islam Syariah di bawah kekuasaan mutlak keluarga kerajaan Arab Saudi. Penegakan hukum Islam ini yang menurut banyak negara sebagai pelanggaran hak asasi manusia menjadi bahan perbincangan dan kritikan berbagai negara (Saudi Arabia, 2005). Arab Saudi sendiri sudah banyak mendapatkan kritikan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di negaranya. Organisasi independen Amerika, Freedom House, setiap tahunnya secara rutin akan memeringkat tingkat hak asasi manusia di negara-negara dunia. Menurut mereka, situasi hak asasi manusia di Arab Saudi belum membaik secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Negara ini berada dalam kategori yang sama dengan negara-negara fundamentalis komunis dan religius seperti Kuba, Korea Utara, Iran dan Laos. (Freedom in the World 2018: Saudi Arabia, 2018)

Pada akhir tahun 2014 Arab Saudi telah menghukum seorang blogger dan juga aktivis Raif Badawi yang menurutnya telah menghina Islam. Dia ditangkap pada tahun 2012 dengan tuduhan menghina Islam melalui saluran elektronik dan dibawa ke pengadilan atas beberapa tuduhan termasuk pemurtadan. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan 600 cambukan pada tahun 2013 (About Raif Badawi, 2017), kemudian pada tahun 2014 Raif Badawi menerima hukuman tambahan yaitu menerima 1000 cambukan dan 10 tahun penjara ditambah denda (Agerholm, 2016).

Arab Saudi sendiri memiliki peraturan undang-undang untuk tidak memberikan kebebasan berekspresi, termasuk untuk pers. Undang-undang dasar menetapkan bahwa “media massa dan semua sarana untuk berekspresi lainnya harus menggunakan bahasa yang sopan, berkontribusi terhadap pendidikan bangsa dan memperkuat persatuan. Media dilarang untuk melakukan tindakan yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan, mempengaruhi keamanan negara atau hubungan pemerintah dengan publik, merusak martabat dan hak asasi manusia.” (Saudi Arabia 2017 human rights report, 2017). Pihak berwenang bertanggung jawab untuk mengatus dan menentukan pidato atau ekspresi berpendapat mana yang melemahkan keamanan internal. Pemerintah dapat melarang atau menanggihkan saluran media jika menyimpulkan bahwa mereka melanggar undang-undang pers dan publikasi dan memantau serta memblokir ratusan ribu internet. Ada banyak laporan tentang pembatasan kebebasan berekspresi (Saudi Arabia, 2016).

Raif Badawi sendiri memiliki situs web Free Saudi Liberals yang mempromosikan sekularisme, kebebasan berbicara dan sesekali menyindir secara

sarkastik terhadap kelompok keras religius Arab Saudi. banyak tulisan-tulisan Raif Badawi yang membuat Arab Saudi marah dan menjatuhkan hukuman kepada blogger tersebut (Hopper, 2018). Di bawah ini beberapa ringkasan singkat dari tulisan-tulisan yang membantu memicu amukan kerajaan Arab Saudi (Black, 2015).

- ***“I’d be the first person to stand and fight Hamas”***

Jika Hamas berhasil menaklukkan Israel, Badawi menulis bahwa ia akan berada di baris pertama untuk menentang budaya mereka tentang “ketidakpedulian dan kematian.” Badawi menentang Hamas bukan karena musuh Israel, tetapi karena tujuannya adalah rezim teokratis. Negara-negara berbasis agama tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada peradaban manusia dan hanya berfungsi untuk “membunuh jiwa-jiwa rakyatnya, membunuh mereka ketika mereka masih hidup dan bernafas.” Dia juga menyinggung rezim teokratis negaranya bahwa Arab Saudi “berperang sehari-hari” untuk memaksakan “pemikiran mundur”

- ***“A women working in public space is equal to a man”***

Apple menerima jaminan dari pemerintah Saudi bahwa mereka dapat membuka kantor di kerajaan tanpa dituntut untuk pencampuran gender. Arab Saudi umumnya melarang pencampuran laki-laki dan perempuan yang tidak terkait (mahrom) termasuk di tempat kerja. Badawi menggambarkan hal ini dengan cerita dari neneknya tentang desa-desa pertanian Arab di mana perempuan bebas bekerja bersama laki-laki. Dia juga mencatat ada banyak bukti pencampuran gender di antara pengikut Nabi Muhammad; mereka tidak berdoa di ruang-ruang yang dipisahkan menurut jenis kelamin atau meminta kerudung wajah untuk para wanita mereka. Badawi menulis bahwa “kita harus menolak suara-suara ekstremisme. Kita

perlu membiarkan kesempatan ini dan membersihkan lapisan busuk terorisme agama dan ekstremisme yang meningkat setiap saat.”

- ***“Liberalism means to simply live and let live”***

Dalam beberapa postingan Badawi berusaha keras untuk menjelaskan konsep liberalisme kepada pembacanya, meskipun kata itu memiliki reputasi di Arab Saudi sebagai musuh moralitas dan agama. Dia menuliskan bahwa “liberalisme dilihat sebagai penghujatan, ketidakpercayaan, perbuatan tidak bermoral seperti telanjang di pantai dan pernikahan sesama jenis.” Tetapi seperti yang dijelaskan Badawi, liberalisme hanya mengacu pada masyarakat di mana kebebasan semua pandangan dihormati. “ini tentang toleransi timbal balik yang tidak diperintah oleh ketidakpedulian atau ketidaktertarikan.” Badawi tidak pernah secara langsung mengkritik agama dan pada kenyataannya dia mengutip secara teratur dari Al-Qur’an dan dari ulama Islam. Namun demikian, dalam satu esai tentang liberalisme ia menulis bahwa agama “tidak memiliki peran dalam kemajuan umat manusia.” Ibadah dan keagamaan hanyalah tentang “hubungan spiritual antara manusia dengan Pencipta” dan tidak dapat digunakan untuk memandu “hukum yang dibuat oleh manusia”.

Pemerintah memonitor ekspresi opini publik dan mengambil keuntungan dari kontrol hukum untuk menghalangi kebebasan berekspresi, berpendapat dan membatasi individu dari terlibat dalam kritik publik terhadap ranah politik (Saudi Arabia 2017 human rights report, 2017). Undang-undang melarang pemurtadan dan penodaan agama yang dapat membawa pelaku pada hukuman mati meskipun tidak ada contoh hukuman mati yang telah dilakukan untuk kejahatan-kejahatan ini.

pernyataan bahwa pihak berwenang ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik raja, monarki, sistem pemerintahan, atau keluarga Al Saud akan mengakibatkan tuntutan pidana bagi warga negara yang mengadvokasi reformasi pemerintah. Pemerintah melarang pegawai publik dari secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam dialog dengan media lokal atau asing atau berpartisipasi dalam pertemuan yang dimaksudkan untuk menentang kebijakan negara (Ghazi, 2018).

Beberapa aktivis hak asasi manusia yang mendapatkan hukuman dan tahanan oleh pemerintah Arab Saudi dibebaskan dengan syarat bahwa mereka tidak boleh lagi menggunakan media sosial untuk melakukan kegiatan aktivis dari berkomunikasi dengan diplomat asing dan organisasi internasional hak asasi manusia. Mereka juga tidak dibolehkan untuk bepergian ke luar negeri (Saudi Arabia 2017 human rights report, 2017).

Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan juga kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah inilah yang membuat Raif Badawi akhirnya mendapatkan hukuman. Raif Badawi sendiri sudah banyak menyuarakan tentang kebebasan berpendapat dan demokrasi dengan mendapatkan berbagai penghargaan seperti *the freedom of speech award 2015 from Deutsche Welle*, *the courage award 2015 from the Geneva Summit for human rights and democracy*, *the one humanity award 2014 from PEN Canada* dan *the netizen prize of reporters without borders 2014* (About Raif Badawi, 2017).

Swedia sendiri adalah negara yang berbanding terbalik dengan Arab Saudi. Swedia memiliki sejarah yang sangat kental dengan hak asasi manusianya. Pada

tahun 2014 sendiri Swedia telah menetapkan kebijakan luar negeri feminis. Dengan keluarnya kebijakan luar negeri ini Swedia menjadi satu-satunya negara yang menganut kebijakan feminis. Penetapan kebijakan luar negeri feminis ini dikatakan oleh menteri luar negeri Swedia Margot Wallstrom bertujuan agar Perempuan dan laki-laki dapat memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk dapat berkontribusi pada kebebasan semua wanita dan anak-anak perempuan dari kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Dalam rencana implementasi kebijakan ini untuk tahun 2016 dalam hal tujuan ini adalah untuk memerangi kekerasan berbasis gender dan seksual terhadap perempuan dan anak-anak perempuan dalam situasi konflik dan pasca-konflik dan impunitas untuk kejahatan seperti itu. Kebijakan ini juga menetapkan langkah-langkah indikatif yang dipertimbangkan untuk berkontribusi pada bidang ini. salah satunya adalah Dinas Luar Negeri Swedia secara aktif ikut menyoroti hubungan antara penyebaran senjata dan kekerasan seksual dan untuk membantu dalam pelaksanaan kewajiban negara-negara yang berada di bawah ATT. Selain itu, Dinas Luar Negeri akan secara aktif mengejar upaya untuk memerangi kekerasan berbasis gender dan seksual dalam konflik bersenjata di tingkat negara dan regional, termasuk sebagai bagian dari pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian, keamanan dan resolusi berikutnya.

Dalam fokusnya untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan operasi dukungan perdamaian, kebijakan luar negeri feminis ini mengharuskan Swedia untuk memastikan integrasi perspektif gender dalam

diskusi, hasil dokumen dan pelucutan senjata yang relevan dan resolusi kontrol senjata, khususnya dalam kaitannya dengan dokumen akhir the Sixth Biennial Meeting of State (BMS6) yang akan diadakan pada tahun 2016 dalam kerangka kerja program PBB tentang perdagangan gelap small arms and light weapons.

Kebijakan ini juga mencakup sejumlah area fokus lainnya untuk tahun 2016 termasuk memperkuat hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan dalam pengaturan kemanusiaan seperti mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak-anak perempuan dan akses mereka ke sumber daya ekonomi, memperkuat hak-hak seksual dan reproduksi anak perempuan dan remaja perempuan. Semua ini relevan untuk keputusan ekspor senjata karena senjata dapat digunakan untuk melanggar atau merusak pencapaian tujuan-tujuan ini.

Setelah diterapkannya kebijakan luar negeri feminis ini, sudah bisa kita lihat kebijakan yang diambil oleh Swedia dalam berhubungan dengan dunia internasional yaitu Swedia telah mengakui Palestina sebagai negara. Menurutnya, Palestina memiliki hak untuk menjadi negara yang merdeka dan kekerasan akibat perang antara Israel dan Palestina akibat perebutan tanah ini berdampak pada banyaknya korban warga sipil, anak-anak, perempuan, hancurnya bangunan-bangunan seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Swedia juga mengkritik Arab Saudi sebagai inegara mitranya karena menurutnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya yang dikritik oleh Swedia terhadap Arab Saudi adalah dalam kasusnya Raif Badawi yang



sudah dijelaskan di atas. Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengatakan bahwa hukuman seperti ini harus segera dihentikan.



**Margot Wallström**

@margotwallstrom

Follow



Blogger Raif Badawi was flogged today in Saudi Arabia. This cruel attempt to silence modern forms of expression has to be stopped.

6:24 AM - 9 Jan 2015

Swedia sendiri telah melakukan kerjasama militer dengan Arab Saudi sejak tahun 2005 yang pada akhirnya kerjasama ini tidak dilanjutkan oleh Swedia pada tahun 2015. Swedia melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Arab Saudi terhadap Raif Badawi adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan tujuan Swedia. Hal ini akan membahayakan kepentingan Swedia dalam mencapai tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia. Swedia sendiri merasa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Arab Saudi akan terus berjalan dan akan memakan banyak korban lainnya.

*Tidak hanya adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya juga melakukan intervensi dalam krisis yang terjadi di Yaman dengan melakukan serangan udara di ibukota yaman. Serangan yang dilakukan oleh negara-negara timur tengah yang dipimpin oleh Arab Saudi ini juga menyebabkan banyak korban dari warga sipil dan merusak banyak bangunan-bangunan seperti sekolah dan rumah sakit.*

*Swedia sendiri memiliki status sebagai negara netral, yaitu suatu negara yang kemerdekaan, politik dan wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara besar dan negara ini tidak akan pernah berperang melawan negara lain kecuali untuk mempertahankan diri dan tidak akan melakukan aliansi yang dapat menimbulkan peperangan. Swedia tidak akan ikut terlibat dalam perang atau konflik negara manapun (Czarny, 2018). Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman dan Swedia yang memiliki kerjasama militer dengan Arab Saudi maka secara tidak langsung Swedia ikut terlibat dalam apa yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman. Sebagai negara netral, Swedia mempertimbangkan statusnya itu untuk tidak melanjutkan kerjasama ini karena apa yang telah dilakukan Arab Saudi di Yaman juga dapat mengancam status netral Swedia yang selama ini sudah dibangun oleh Swedia.*

## **B. Pemblokiran pidato Menteri Luar Negeri Swedia di pertemuan Liga Arab**

Setelah Swedia menetapkan kebijakan luar negeri feminisnya, pemerintah Swedia yang baru telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk secara resmi mengakui negara palestina dan menjadikannya negara Uni Eropa bagian barat pertama yang melakukannya. Dengan reputasi Swedia sebagai broker yang jujur dalam urusan internasional dan dengan memiliki suara yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa, keputusan ini mungkin akan dapat mempengaruhi negara-negara Uni Eropa lainnya (Beaumont, 2014).

Menteri luar negeri Swedia Margot Wallstrom akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa Swedia mengakui negara Palestina pada 30 Oktober 2014. dalam pengumumannya ini Margot Wallstrom mengatakan bahwa keputusan ini adalah sebuah langkah penting yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri (Beaumont, 2014). Wallstrom berharap bahwa keputusan yang diambil oleh Swedia ini dapat diikuti oleh negara-negara lainnya. Pemerintah Swedia menganggap bahwa kriteria hukum internasional dalam mendirikan negara yaitu wilayah, warga negara, dan pemerintah telah terpenuhi (Kershner, 2014). Swedia berharap bahwa keputusannya ini juga akan dapat memfasilitasi perjanjian damai dengan membuat pihak-pihak lainnya ikut andil dalam mendukung Palestina dan memberikan kontribusi untuk memberikan harapan pada Palestina pada saat ketegangan meningkat (Beaumont, 2014).

Dalam web site resminya, Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom mengatakan:

*“The purpose of Sweden’s recognition is to contribute to a future in which Israel and Palestine can live side by side in peace and security. We want to contribute to creating more hope and belief in the future among young Palestinians and Israelis who might otherwise run the risk of believing that there is no alternative to the current situation.”*

Swedia juga mengadopsi strategi bantuan lima tahun termasuk dukungan yang meningkat secara substansial untuk pembangunan negara Palestina. Bantuan bilateral ke Palestina akan meningkat sebesar SEK 500 juta hingga SEK 1,5 miliar

selama periode lima tahun berikutnya di samping bantuan kemanusiaan (Sweden recognises Palestine and increases aid, 2014).

*“Sweden’s contribution aims among other things to make it easier for Palestinians to support themselves and to continue living where they are, to strengthen women’s empowerment and strengthen resilience to environmental and climate changes. This increased assistance means support to all moderate and non-violent forces in Palestine promoting democracy, human rights and gender equality”* Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional, Isabella Lovin.

Langkah yang diambil oleh Swedia mendapatkan apresiasi dari banyak negara, khususnya negara-negara timur Tengah. Seorang juru bicara presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyambut keputusan Swedia ini. dia menggambarkan bahwa keputusan yang diambilnya adalah sebagai keputusan yang “Berani dan bersejarah. Semua negara di dunia yang masih ragu-ragu untuk mengakui hak kami untuk negara Palestina merdeka berdasarkan batas tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya seharusnya mengikuti langkah yang diambil oleh Swedia” (Beaumont, 2014).

Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga menyambut baik keputusan yang diambil oleh Swedia dengan mengundang Swedia sebagai tamu kehormatan untuk datang dalam pertemuan Liga Arab yang diadakan pada 9 Maret 2015 di Kairo, Mesir. Menteri Luar negeri Margot Wallstrom telah diundang untuk memberikan pidato pada pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab dan

perjalanan ini bertujuan untuk membangun kerja sama untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia dan integritas ekonomi (Ahlander & Sennero, 2015).

Tetapi dalam pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab ini pidato yang akan disampaikan oleh Margot Wallstrom di blokir oleh Arab Saudi yang bereaksi keras terhadap posisi pemerintahnya pada demokrasi dan hak asasi manusia. Wallstrom mengatakan bahwa kemungkinan pemblokiran pidatonya yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah karena Swedia telah menyoroti situasi demokrasi dan hak asasi manusia.

*“The explanation we have been given is that Sweden has highlighted the situation for democracy and human rights, and that is why they do not want me to speak. It’s a shame that a country has blocked my participation.”*

Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom sendiri sebelumnya telah mengomentari terkait hak asasi manusia yang ada di Arab Saudi. dia menentang hukuman “abad pertengahan” terhadap blogger Raif Badawi yang dijatuhi hukuman 1000 cambukan dan 10 tahun penjara karena telah menghina Islam (Crouch, 2015). Dia juga telah memperjuangkan kebijakan luar negeri feminis yang harus mencakup penguatan hak-hak perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perspektif gender tentang bagaimana sumber daya dialokasikan (Crouch, 2015).

Dengan adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom dalam pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo membuat hubungan kedua negara memanas. Swedia merasa

kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Pada tahun yang sama ini Swedia juga memiliki hubungan kerjasama militer dengan Arab Saudi yang harus diperpanjang pada bulan Mei 2015 (Galih, 2015). Hubungan kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Tetapi akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap pidato Menteri Luar Negeri Swedia di Liga Arab membuat perpanjangan perjanjian kerjasama militer ini dikesampingkan di dalam partai Wallstrom sendiri yaitu partai demokrat sosial dan juga oleh mitra koalisinya partai hijau (Patnistik, 2015). Pada akhirnya setelah didesak oleh dua partai tersebut, Perdana Menteri Swedia Steven Lofen memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak perjanjian kerjasama militer ini dengan Arab Saudi sehari setelah Arab Saudi memblokir pidato Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom yang diundang sebagai tamu kehormatan di pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo.

*Hal ini tidaklah mengherankan jika kedua partai tersebut mendesak untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama militer dengan Arab Saudi. Kita bisa melihat lebih jauh faktor domestik yang mempengaruhi keputusan ini. Dalam peraturan ekspor senjata sudah jelas dinyatakan bahwa ISP (The Swedish Inspectorate for Strategic Product) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menerapkan kontrol ekspor senjata telah mengindikasikan bahwa Gender Based Violence (GBV) menjadi pertimbangan dalam proses penilaian resiko. “Ketika datang ke penilaian, kami melihat situasi keseluruhan di negara penerima,” kata Direktur Jenderal ISP Ahlstrom. “Jika itu adalah negara yang mengalami masalah internal atau konflik bersenjata, negara-negara itu tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima untuk ekspor senjata Swedia.”*

*Menurut Ahlstrom, resiko pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional biasanya diurus dengan fakta bahwa Swedia tidak mengekspor ke negara-negara yang berada dalam konflik bersenjata. "Saya pikir Gender Based Violence adalah masalah lintas sektoral. Ini terkait dengan berbagai bidang hukum internasional, hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. ATT telah menempatkan fokus khusus pada kekerasan berbasis gender dengan referensi spesifiknya terhadap Gender Base Violence." (Gerome, 2016)*

### **C. Kesimpulan**

Arab Saudi merupakan negara yang belum demokratis dan menggunakan hukum syariah sebagai dasar hukum di negaranya. Penerapan hukum syariah ini menjadikan Arab Saudi masih menggunakan sistem hukuman yang dikatakan oleh Swedia sebagai hukuman abad pertengahan. Hal ini dialami oleh seorang blogger Raif Badawi yang mendapatkan hukuman cambuk oleh kerajaan Arab Saudi setelah dianggap telah menghina Islam. Hal ini mendapatkan kritikan oleh Swedia karena menurutnya hukuman seperti ini telah melanggar hak asasi manusia yang Swedia sendiri adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kritikan yang dilakukan oleh Swedia terhadap Arab Saudi ini akhirnya berbuntut panjang yang memanaskan hubungan antara ke dua negara ini. dalam

pertemuan Liga Arab di Kairo sendiri Swedia diundang untuk memberikan pidatonya terkait dengan keputusannya mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Tetapi karena kekecewaan Arab Saudi terhadap Swedia atas kritikan terhadap urusan internalnya membuat Saudi memblokir pidato menteri luar negeri Swedia tersebut. Kejadian ini membuat hubungan kedua negara semakin panas karena Swedia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. sehari setelah terjadinya pemblokiran pidato menteri luar negeri Swedia, Swedia memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama militer dengan Arab Saudi dengan alasan terjadinya pemblokiran pidato menteri luar negeri Swedia di pertemuan Liga Arab dan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi yang hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Swedia tentang hak asasi manusia terlebih lagi Swedia telah menetapkan kebijakan luar negeri feminis.



